

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17(1), 17–34.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (Kedua). Prenadamedia Group.
- Anshari, & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy Sanksi Pidana Mati di Indonesia). *Res Judicata*, 3(1), 26–50.
- Arifin, R., Syarifudin, I., & Holish, A. M. (2021). Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid- 19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 237–262.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. *Aspirasi*, 6(1), 1–7.
- Bawono, M. D. N. A. dan B. T. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU 4)*, 448–462.
- Bustamam, A. (2020a). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 260–280.
- Bustamam, A. (2020b). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 260.
- Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 137–150.
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana* (M. C. Group (ed.)). Referensi.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

- Fahmi, H. (2021). *Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Hamid, M. A. (2015). Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Legal Pluralism*, 5(2), 171–201.
- Harahap, H. (2010). *Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.
- Hartanto, D. R., Widodo, Suwarno, P., & Sumantri, S. H. (2021). Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 68–71.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Hukum Pidana (Kesatu)*. Universitas Terbuka.
- ICW. (2010, April 12). *Menghukum Mati Koruptor*. 2, 2–3.
- ICW. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021*. [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)
- Jainah, Z. O. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (I. N. Seftiniara (ed.)). Tira Smart.
- Koko Arianto Wardani, S. E. W. (2017). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951–958.
- Ludiana, T. (2020). Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam R UU Kuhp). *Litigasi*, 21(1), 60–79.
- Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 387–398.
- Nugraha, S. P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *National Conference For Law Studies*, 978–979.
- Pane, M. D. (2019). Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1), 37–48.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Rukman, A. A. (2016). Pidana Mati Ditinjau dari Prespektif Sosiologis dan

- Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium*, IV(1), 115–124.
- Salam, I. (2010). *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*. Universitas Islam Indonesia.
- Salam, M. F. (2004). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Pustaka.
- Setia Darma Sinuraya, T., Widodo, & Suwarno, P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 125–130.
- Shihab, N. (2018). *Catatan Najwa - Palu Hakim Artidjo: "Saya Ingin Hukum Mati Koruptor."* <https://www.youtube.com/watch?v=FxQDHc1RtCU>
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Penerbit Kepel Press.
- Sutoyo, D. (2019). Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 171.
- Tantowi, W. (2021). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 178.
- Tim, R. dan. (2012). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*.
- Umar, N. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (E. M. Risakotta (ed.)). LP2M IAIN Ambon.
- Wildan Tantowi, Saraswati, N. G. A. . A., & Gayatri, V. S. (2021). Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati untuk Koruptor pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *UIR Law Review*, 5(1), 49–58.
- Winasya Pricillia Sumenge. (2019). Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(12), 48–55.
- Wiyono, R. (2016). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Tarmizi (ed.); Kedua). Sinar Grafika.
- Wulansari. (2017). Efektifitas Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar) [Uin Alauddin Makasar]. In *Uin Alauddin Makasar*.